



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI XI DPR RI**

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA (BI), OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK): PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), BUMN (PMN DAN PRIVATISASI), DAN BADAN PENGELOLA INVESTASI (BPI) DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA) DAN PENGELOLAAN *HOLDING* INVESTASI

Rapat Ke : 36
Tahun Sidang : 2025-2026
Masa Persidangan : V
Jenis Rapat/ke- : Rapat Dengar Pendapat / ke-7
Dengan : BUMN penerima PMN Tunai Tahun 2025
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari, Tanggal : Senin, 22 Juni 2026
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I Lt. 1
(hadir fisik)
Ketua Rapat : **Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.**
(Ketua Komisi XI DPR RI)
Sekretaris Rapat : Danis Maya
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Acara : Pengambilan keputusan atas Penyertaan Modal Negara
(PMN) Tunai Tahun 2025
Hadir : 1) ... orang dari **48 Anggota** Komisi XI DPR RI;
2) **BOBBY RASYIDIN** (Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero)) beserta jajarannya;
3) **EKO PURWANTO** (Direktur Utama PT. Industri Kereta Api (Persero)) beserta jajarannya;
4) **BUDI SETYAWAN WIJAYA** (Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)) beserta jajarannya; dan
5) **ANANTA WIYOGO** (Direktur Utama PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero)) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan BUMN penerima PMN Tunai Tahun 2025 dilakukan dengan kehadiran secara fisik. Sesuai dengan ketentuan **Pasal 279** dan **Pasal 281 ayat (1)** Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul **14.14 WIB** dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan BUMN penerima PMN Tunai Tahun 2025 diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan pemaparan dari BUMN penerima PMN Tunai Tahun 2025.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Komisi XI DPR RI bersama Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Direktur Utama PT. Industri Kereta Api (Persero), Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Direktur Utama PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Direktur Utama PT. Industri Kereta Api (Persero), Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Direktur Utama PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), mengenai Perkembangan atas Penyertaan Modal Negara Tunai dalam APBN Tahun 2025 kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero), PT. Industri Kereta Api (Persero), PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero).
2. Komisi XI DPR RI mengapresiasi efektivitas pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2025 terhadap PT. Kereta Api Indonesia (Persero), PT. Industri Kereta Api (Persero), PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) secara tepat guna, transparan, dan akuntabel.
3. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengoptimalkan PMN Tunai Tahun 2025 untuk mendukung tahapan pengadaan KRL baru dan retrofit armada serta dioptimalkan sesuai rencana bisnis dan jadwal pelaksanaan proyek yang telah ditetapkan, sehingga tidak berdampak pada terganggunya pelayanan publik dan menimbulkan idle fund yang mengurangi efektivitas investasi pemerintah.
4. PT. Industri Kereta Api (Persero) mengoptimalkan penggunaan PMN Tunai Tahun 2025 untuk mendukung transformasi industri melalui modernisasi fasilitas produksi, pengembangan teknologi dan integrasi transformasi digital guna pemenuhan kebutuhan sarana kereta api dalam negeri, dan meningkatkan daya saing produk perkeretaapian nasional, serta mengoptimalkan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

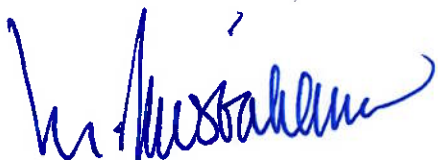
5. PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) mengoptimalkan penggunaan PMN Tunai Tahun 2025 untuk pengadaan armada kapal penumpang baru sesuai dengan *timeline* yang ditentukan sehingga memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan moda transportasi laut.
6. PT. Kereta Api Indonesia (Persero), PT. Industri Kereta Api (Persero), dan PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) memastikan setiap penggunaan PMN harus berorientasi pada peningkatan konektivitas, kapasitas layanan, keselamatan, efisiensi operasional perusahaan, serta memberikan dampak *multiplier effect* pada pertumbuhan ekonomi nasional.
7. PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) mengantisipasi risiko kenaikan suku bunga, yang dapat mempengaruhi besaran leverage atas PMN Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan pembiayaan rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
8. PT. Kereta Api Indonesia (Persero), PT. Industri Kereta Api (Persero), PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) menyampaikan laporan berkala kepada komisi XI mengenai perkembangan realisasi fisik dan keuangan PMN, termasuk indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*) yang menunjukkan manfaat nyata atas penggunaan PMN terhadap peningkatan kinerja perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.
9. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Direktur Utama PT. Industri Kereta Api (Persero), Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Direktur Utama PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) memberikan jawaban atas pertanyaan dan masukan dari Pimpinan/Anggota Komisi XI DPR paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
10. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Direktur Utama PT. Industri Kereta Api (Persero), Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Direktur Utama PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) mengenai Realisasi Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2025.
11. Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan PMN Tunai Tahun 2025 terhadap PT. Kereta Api Indonesia (Persero), PT. Industri Kereta Api (Persero), PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), Komisi XI DPR RI akan menjadwalkan Kunjungan Kerja Spesifik dan selanjutnya hasil dari Kunjungan Kerja tersebut akan ditindaklanjuti dalam Rapat Komisi XI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI ditutup pada pukul **14.26 WIB.**

Jakarta, 22 Juni 2026

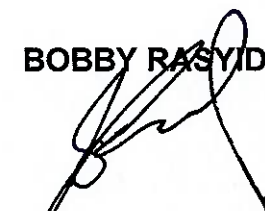
**PIMPINAN KOMISI XI DPR RI
KETUA RAPAT,**



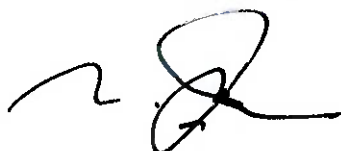
Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.

**DIREKTUR UTAMA
PT. KERETA API INDONESIA
(PERSERO),**

BOBBY RASYIDIN

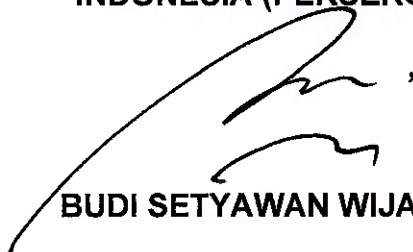


**DIREKTUR UTAMA
PT. INDUSTRI KERETA API (PERSERO),**



EKO PURWANTO

**DIREKTUR UTAMA
PT. PELAYARAN NASIONAL
INDONESIA (PERSERO),**



BUDI SETYAWAN WIJAYA

**DIREKTUR UTAMA
PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
(PERSERO),**



ANANTA WIYOGO